

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Nasution, Faisal Akbar . (2009). *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- HAW, & Widjaja. (2013), *Penyelenggaraan otonomi di indonesia : Dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*, Rjawali Pres, Universitas Bengkulu
- Lubis, Irwansyah. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (1991). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offsite.
- Siahaan, Mariot P. (n.d.). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan, M., & Jimmy P. (2009). *Dictrionary of Lw Complate Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- R.Santoso Brotodihardjo. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Rochmat Soemitro . (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan .* Bandung: Eresco.
- Salim, HS. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Samodra Wijaya. (1992). *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sarwoto. (1990). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, & Mariot. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soejono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, P. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi Offsite.
- Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Cikai Sakti.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Zaenudi Ali. (2007). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

B. Jurnal – Jurnal

- Achmad Ali. (2010). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. *Kencana*, Vol. 1
- Ardyan Firdausi Mustoffa. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol VII, No. 1, April 2018, ISSN: 2477-4995
- Fitri Tri Wahyudi. (2021). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Puwakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 8, No. 2 September 2021
- Jafar Nurdin Siradjah. (2014). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Maros. *Fakultas Hukum Unibersitas Hasanuddin*.
- Nunung Manis Setyani, Rita Andini, & Abrar Oemar. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang. *Journal of Accounting*, Volume IV, Nomor 4, April 2018, ISSN.
- Stephana Dyah Ayu R, & Rita Hastuti. (2009). Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Dimateral pada tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Keungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan

Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Kajian Akuntansi*, Vol.1 , No.1, Februari 2009, ISSN : 1979-4886.

Wa Ode Aswati, Ariffudin Mas'ud, & Tuti Nurdianti Nudi. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*, Vol.III, No.1, Februari 2018, ISSN: 2503-1635

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

D. Website

Cermati.com, 2022, "Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya" , source: <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

Yogama Wisnu, 2022, *20 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Undang-Undang* , source: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-pajak-menurut-para-ahli?page=all> , diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

Putri Novani Khairizka, 2022, *Hukum Pajak Formal & Material, Apa Perbedaannya?* , source: <https://www.pajakku.com/read/62d519f2a9ea8709cb18b101/Hukum-Pajak-Formal-&-Material-Apa-Perbedaannya?> , diakses pada tanggal 5 November 2022.

Author, Mei 2022, *Mekanisme : Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Manfaat – Macam*, source: <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/> , diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, <https://bapenda.kalbarprov.go.id/web/berita/pemerintah-provinsi-kalimantan-barat-beri-pembebasan-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor.html>,